

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Tinjauan Historis

Menurut definisi yang paling umum, kata *history* berarti masa lampau umat manusia. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata *history* dikenal dengan istilah sejarah. Kata Inggris *history* (sejarah) berasal dari kata benda Yunani *Istoria*, yang berarti ilmu". (Louis Gottschalk. 1983; 27). Dalam perkembangan jaman, kata latin yang sama artinya yakni *scientia* lebih sering dipergunakan untuk menyebutkan kajian sistematis non-kronologis mengenai gejala alam, sedangkan kata *istoria* biasanya diperuntukkan bagi penelitian mengenai gejala-gejala (terutama hal ihwal manusia) dalam urutan kronologis.

Berdasarkan konsep di atas, maka sejarah adalah satu ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lampau manusia dan ditulis secara kritis dan sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan historis memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penyelidikan ataupun penelitian terhadap gejala peristiwa masa lampau manusia baik individu maupun kelompok beserta lingkungannya yang ditulis secara ilmiah, kritis dan sistematis meliputi urutan fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah berlalu itu

(kronologis), dengan tafsiran dan penjelasan yang mendukung serta memberi pengertian terhadap gejala peristiwa tersebut.

Melalui simpulan pengertian di atas, maka maksud penggunaan konsep tinjauan historis dalam penulisan ini adalah suatu penelitian peristiwa masa lampau mengenai ekspansi Bani Saljuq ke wilayah Anatolia dan upaya-upaya lanjutan pasca penaklukan yang ditulis berdasarkan kerangka teoritis dalam penulisan kajian sejarah dan memberi pengertian atas peristiwa tersebut.

2.1.2 Konsep Ekspansi

Adalah hal lazim untuk ukuran zaman itu, ketika tatanan dunia memang belum dibangun atas kesepakatan, minimal persetujuan dari segenap bangsa, tetapi lebih berdasarkan pada paksaan dari pihak yang sanggup menggelar kekuatannya terhadap yang lain sehingga terpaksa tunduk patuh, maka perluasan wilayah tidaklah dinilai sebagai pelanggaran, melainkan sebuah penghamparan sebagian riwayat perjalanan dalam pentas kehidupan bangsa-bangsa. Sehingga banyak kisah yang sampai kepada kita bagaimana penaklukan dalam ajang pertempuran-pertempuran besar terjadi untuk sebuah hegemoni terhadap wilayah hingga pada pelenyapan suku bangsa dan peradabannya dari muka bumi untuk diletakkan pada memori yang menyejarah.

Untuk memahami maksud dari penggunaan kata ekspansi, berikut beberapa pengertiannya. Secara definisi kata, menurut Zainul Bahri bahwa ekspansi adalah memperluas daerah negara sendiri dengan jalan menduduki wilayah negara lain.

(Zainul Bahry. 1992; 62). Dalam pengertian lain disebutkan oleh Hartono bahwa ekspansi adalah perluasan suatu negara dengan menduduki wilayah negara lain. (Drs. Hartono. 1992; 35).

Dalam skala global, perluasan wilayah atau ekspansi secara umum dipenuhi muatan tujuan, baik yang ekonomis, politis hingga ideologis. Jika dikaitkan dengan suatu gerakan paham, maka menjadi ekspansionisme, yang artinya yaitu sebagai paham yang ingin menguasai suatu objek, dalam hal ini adalah wilayah, untuk tujuan tertentu, misalnya ekonomi, politik, penguasaan teritorial, penyebaran ideologi dan sebagainya. Istilah tersebut lebih sering mengacu pada doktrin suatu negara dalam memperluas wilayah teritorialnya.

Ekspansi dengan motif ekonomi, maka sebagai agenda besarnya adalah penguasaan wilayah dengan menekankan aspek perekonomian suatu wilayah sebagai objek penguasaannya. Hal demikian merupakan model penguasaan yang mana sumber daya alam dan manusianya kelak diupayakan dan diharuskan mampu menyuplai ekonomi negara penakluk. Penyetokkan sumber kekayaan tersebut dapat melalui eksploitasi kedua sumber daya berikut menjadikan wilayah tersebut sebagai tujuan penetrasi pasar atas produk penguasa, sehingga potensi aktivitas ekonomi ini juga dikuasai.

Ekspansi dengan motif demikian telah banyak terpraktekkan oleh kerajaan atau negara-negara baik di barat maupun timur. Di zaman Kekaisaran Romawi misalnya, ia berekspansi dan menguasai kawasan Afrika Utara dan Asia Barat bagian utara. Disebutkan penguasaan atas wilayah, salah satunya Mesir telah

begitu menyensasikan, hingga dikatakan Romawi menganggap Mesir sebagai sapi perahan.

Setelah Abad Pertengahan, beberapa bangsa Eropa dengan semangat God, Glory dan Gospelnya tetap melanjutkan proses tersebut hingga meningkatkan pada bentuk kolonisasi yang lebih terstruktur. Keadaan ini terus berpacu sampai akhirnya di titik tertentu memicu semangat warga terjajah untuk bersatu dalam identifikasi *nation* membentuk negara nasional di daerah-daerah koloni.

Dengan melihat beragamnya tujuan yang ingin dicapai dari proses ekspansi, maka penulisan ini difokuskan pada tujuan politik, sehingga ekspansi dipandang sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tujuan yang seperti itu, atau dapat dikatakan ekspansi merupakan prasyarat utama untuk membentuk sistem pada wilayah yang mana tujuan politis kelak ingin direalisasikan. Sehingga diasumsikan bahwa pembangunan politik identik dengan usaha memperluas wilayah pengaruh kekuasaan, sekaligus kemudian mendistribusikannya (Huntington, S.P. 2003; 170).

Dalam prinsip Islam, dapat pula dipahami bahwa ekspansi merupakan suatu proses perluasan wilayah dengan jalan penaklukan dan penguasaan daerah lain untuk pencapaian tujuan, yang dalam sumber berbahasa Arab digunakan istilah *fath* untuk penaklukan yang maksudnya menguraikan mengenai pengambilalihan wilayah kekuasaan Bizantium dan Persia. Penaklukan dapat mengambil berbagai bentuk berbeda. Dalam kondisi ekstrim, ia dapat berarti serangan dengan kekuatan, namun penaklukan kerap kali merupakan proses yang penuh damai, seperti adanya kesepakatan dan dengan persyaratan *jizyah*, dan hal inilah yang di

kedepankan, yakni masuk Islam secara sukarela atau jika tidak, maka membayar *jizyah* dan akan terlindungi. Hal tersebut nampak pada ajakan-ajakan yang disampaikan pada para penguasa untuk menerima Islam.

Bila kau menolak, kau harus membayar denda (*jizyah*). Ini adalah hal yang buruk tetapi tidak seburuk pilihan lain; bila kau menolak membayar, akan ada perang. Bila kau merespons secara positif dan memeluk agama kami, kami akan memberikan kalian Kitab Allah dan mengajarkan kandungan isinya. Bila kalian memerintah berdasarkan aturan yang ada dalam kitab ini, kami akan meninggalkan negeri kalian dan membiarkan kalian berurusan dengan persoalan kalian sendiri sekehendakmu. Bila kalian melindungi diri melawan kami dan membayar upeti, kami akan menerima darimu dan menjamin keselamatanmu, jika tidak, kami akan melawan kalian. (Tabari; 2240 dalam Hugh Kennedy, 2010; 62)

Adapun jika perang harus ditempuh, maka Islam pun telah mengenalkan batasan etikanya sendiri, yaitu utamanya dilarang perang dengan tujuan untuk memaksa orang memasuki agama atau untuk genosida, memperbudak individu atau kaum, merampas kekayaan umat atau untuk menindas. (Yusuf Qardhawi, 2010; 285)

Demikian pula yang mendasari prinsip dari bangsa Turki, dalam hal ini Bani Saljuq dalam berekspansi untuk meluaskan dunia Muslim.

Bangsa Turki menjadi pendukung Islam yang paling ikhlas. Mereka berjuang untuk kejayaan dan perluasan Islam dengan perguruan-perguruannya, cerdas pandainya dan orang-orang sadunya. Mereka hidup sebagai suri tauladan bagi Muslim. Mereka menyebarkan Islam dengan jalan damai. Perluasan bangsa Turki dengan pedang adalah untuk maksud-maksud ekonomi atau militer dan bukanlah untuk memaksakan Islam kepada orang yang bukan Muslim. Mereka menggunakan pedang hanyalah dalam membela Islam, bukan untuk perluasannya, tetapi memang mereka membelanya dengan segala tenaga dan jika perlu dengan jiwa raganya. (Hasan Basri Cantay, 1986; 290)

Melalui pengertian dan prinsip-prinsip tersebut, maka ekspansi dalam konteks penelitian ini adalah suatu usaha perluasan wilayah yang dilakukan oleh Bani Saljuq pada tahun 1063-1092 ke sebagian wilayah kekuasaan Kekaisaran

Bizantium yang terletak di Asia yakni Anatolia untuk membangun sistem politik dan ranah kehidupan dalam kerangka perluasan pengaruh kerajaannya, berikut menyertakan Islam untuk dibumikan di Anatolia sebagai tujuannya baik dengan jalan damai atau pertempuran.

Ekspansi tersebut memanglah gerakan yang politis. Sebagai suatu usaha Bani Saljuq meluaskan wilayahnya, namun demikian sebagai pemimpin muslim ia juga ikut membawa serta misi perluasan pengaruh Islam, sehingga tidak tepat jika dikatakan Islam itu ekspansif, tetapi ekspansi itu sendiri digerakkan oleh kemauan politik.

Jika penguasa Muslim berekspansi untuk tujuan perluasan Islam, maka ekspansi itu adalah cara untuk mendukung ketercapaian tujuan tersebut, yaitu: menghilangkan rintangan dari dakwah Islam, usaha preventif untuk menjaga pemerintahan Islam dan untuk membebaskan bangsa-bangsa terjajah. (Yusuf Qardhowi, 2010; 281)

Setelah ekspansi berhasil dijalankan, maka tentunya terdapat upaya lanjutan dengan mempertahankan keberhasilan tersebut, yaitu menguasai wilayah Anatolia. Usaha menguasai wilayah ini oleh Bani Saljuq, setidaknya melalui dua cara, yakni langkah politis dengan melembagakan kekuasaan, yang hal tersebut disokong oleh pengkolonian dengan jalan membuka wilayah Anatolia untuk imigrasi suku bangsa Turki dan Muslim sebagai cara yang juga ditempuh dalam upaya pasca penaklukan Anatolia.

2.1.3. Konsep Melembagakan Kekuasaan

Melembagakan adalah mengorganisasikan sebagai lembaga (artikata.com). adapun kekuasaan dapat didefinisikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang. Sehingga dengan demikian dapat merupakan suatu konsep kuantitatif, karena dapat dihitung hasilnya. Misalnya berapa luas wilayah jajahan, berapa banyak orang yang bisa dipengaruhi, berapa lama berkuasa. (Inu Kencana. 1997; 53)

Maka melembagakan kekuasaan adalah mengorganisasikan kekuasaan sebagai lembaga. Atau dapat dipasifkan menjadi kekuasaan yang dilembagakan, yang dengan itu kekuasaan menjadi baku dan stabil. Jika kekuasaan dilembagakan wujudnya adalah pemerintahan. Sebagai suatu kekuasaan yang dilembagakan, pemerintahan suatu negara tidak hanya tampak bagaikan kenyataan memiliki kekuasaan, tetapi juga diakui mempunyai hak untuk menguasai. (Inu Kencana. 1997; 54)

Pemerintahan sebagai hasil dari pelembagaan kekuasaan berjalan melalui penerapan sistem penguasa pusat terhadap daerah taklukan baru. Secara umum di banyak daerah taklukan Muslim, pelembagaan itu ditempuh dengan mendirikan pemerintahan hierarkis sebagaimana pusat, jika di pusat adalah kekhilafahan yang pemimpinnya disebut khalifah, maka daerah sebagai provinsi, sebagai pejabat gubernurnya bergelar *amir* atau wali. Demikian halnya dengan Saljuq, hal itu nyata pada upaya Saljuq ketika menaklukan Anatolia, yakni ketika kekuasaan yang diorganisir dengan memasukkan wilayah ini dalam kesatuan teritorial di

bawah pemerintahan Bani Saljuq yang diwakilkan kepada Sulaiman ibn Qutlumish sebagai gubernurnya.

Secara umum bentuk pelembagaan itu adalah pada sistem pemerintahan dengan pengangkatan *amir* sebagai penguasa yang tidak independen, dan untuk pertahanan wilayah digunakan tentara reguler Turki dan dari tentara khalifah. Hal itu telah menjadi kebiasaan lantaran memang bangsa Turki telah lama bergabung dalam ketentaraan khalifah, bahkan dalam komposisi besar hingga berpengaruh pada ranah politik. Seperti disebutkan bahwa menjelang akhir abad ke-9, mereka merupakan bagian utama ketentaraan Abbasiyah dan kekuatan yang harus diperhitungkan dalam percaturan politik. (Watt, 1990; 105) Bukti lainnya adalah ketika penaklukan dan terjadinya Perang Manzikart yang merupakan kemenangan awal penting bagi tentara sultan dan khalifah melawan pasukan reguler kaisar Romawi (Muhammad Sholihin, 2010; 55).

Berdasarkan teori di atas, maka dalam penelitian ini melembagakan kekuasaan Bani Saljuq adalah mengorganisasikan kekuasaan Bani Saljuq di Anatolia pasca penaklukan sehingga berdiri menjadi pemerintahan yang berkuasa atas wilayah baru ini dalam konteks ekspansi.

2.1.4. Konsep Imigrasi

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin "*migratio*" yang berarti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah "*emigratio*" yang memiliki arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya

istilah “*immigratio*” dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antarnegara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut sebagai peristiwa imigrasi. Konferensi internasional tentang emigrasi dan imigrasi, tahun 1924 di Roma memberikan definisi imigrasi sebagai suatu: “Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence.” Yang artinya gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. (Ahmad Zaeni pada <http://www.shoutmix.com>)

Proses migrasi pada masyarakat nomaden adalah hal biasa, hal ini dilakukan untuk pertahanan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang menunjang eksistensi mereka. Atas hal demikian dikenal adanya konsep masa migrasi atau yang disebut juga Invasi Barbar, yakni suatu periode migrasi manusia yang terjadi sekitar tahun 300M-700M di Eropa yang menandai transisi dari Zaman Kuno Akhir ke Abad Pertengahan Awal. Namun migrasi terus berlangsung di luar periode tersebut, yang ditandai dengan penaklukan Arab atau penaklukan Kesultanan Ustmaniyah, serta penaklukan bangsa Viking, Magyar, Moor, Turki dan Mongol. Ini memiliki pengaruh yang signifikan, terutama di Afrika Utara, Semenanjung Iberia, Anatolia, Eropa Tengah dan Timur.

Adapun imigrasi bangsa Turki ke Anatolia mulai terjadi pada abad ke-11. Proses ini dipercepat setelah kemenangan Saljuq melawan kekaisaran Bizantium pada pertempuran Manzikart (Republika Online)

Berdasarkan konsep tersebut, maka imigrasi bangsa Turki ke wilayah Anatolia adalah berpindahnya mereka dari asalnya di Asia Tengah dan masuk ke Anatolia setelah penaklukan dan dibukanya wilayah ini oleh Bani Saljuq untuk imigrasi bangsanya dan Muslim pada umumnya.

2.2 Kerangka Pikir

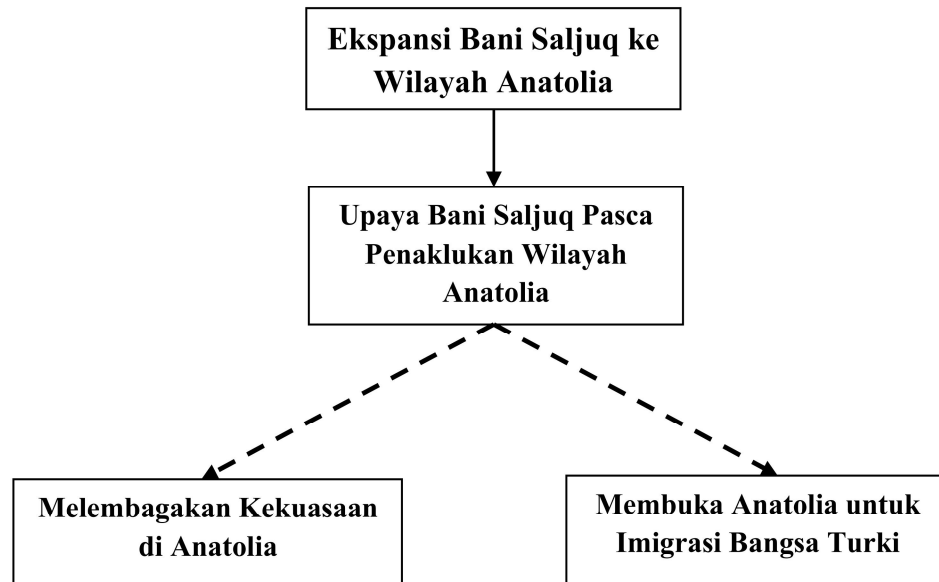
Pemerintahan Bani Saljuq bertahan selama lebih dari dua abad (447-656H/1055-1258M). Dengan penguasaan atas wilayah yang demikian luasnya, tentu tidak dapat dilepaskan dari hasil serangkaian ekspansi yang pernah dilakukan Tughril Beg ke arah barat yang kemudian diteruskan oleh sultan selanjutnya, yaitu Alp Arselan dan kemudian Maliksyah. Yang mana disebutkan bahwa di bawah pemerintahan keduanya lah Bani Saljuq menjalani masa ekspansif yang gemilang dan menikmati kejayaan.

Sebagai reaksinya, pada tahun 1071 Bizantium dengan pasukan koalisi besarnya melakukan serangan atas Bani Saljuq, sehingga terjadilah pertempuran Manzikart, yang ternyata justru berakhir dengan kekalahan bagi Bizantium. Setelah wafatnya Alp Arselan, ekspansi ke Anatolia dilanjutkan oleh putranya yaitu Maliksyah. Pada masanya mampu mencapai wilayah di selatan pantai laut Marmarah, yang berarti Bani Saljuq telah berada di muka Eropa.

Kemenangan dalam serangkaian proses ekspansi ke wilayah Anatolia ini, yang hasilnya kelak menjadi bagian teritorial yang berarti memperluas batas geografis dan politisnya, maka saat itu pula disusul oleh upaya-upaya yang dilakukan Bani Saljuq pasca penaklukan Anatolia, yaitu melembagakan kekuasaan Bani Saljuq di wilayah Anatolia dan membuka wilayah Anatolia untuk imigrasi bangsa Turki.

Berdasarkan paparan di atas dapat dinyatakan bahwa ekspansi Bani Saljuq ke wilayah Anatolia diikuti dengan upaya lanjutan pasca penaklukan wilayah Anatolia. Bertolak dari keterangan tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti adanya upaya-upaya yang dilakukan Bani Saljuq pasca penaklukan wilayah Anatolia.

2.3 Paradigma



Keterangan

—————> : Garis Usaha

- - - - -> : Garis Pelaksanaan

REFERENSI

- Louis Gottschalk. 1986. *Mengerti Sejarah*. Universitas Indonesia Press: Jakarta. Halaman 27.
- Samuel. P. Huntington. 2003. *Tertib Politik: di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman 170.
- Zainul Bahry. 1996. *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*. Angkasa: Bandung. Halaman 62.
- Hartono. 1992. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta. Halaman 35.
- Hugh Kennedy. 2010. *The Great Arab Conquest: Penaklukan Terbesar dalam Sejarah Islam yang Mengubah Dunia*. Pustaka Alvabet: Jakarta. Halaman 62.
- Yusuf Qardhowi. 2010. *Fiqih Jihad*. PT. Mizan Pustaka: Bandung. Halaman 285.
- Hasan Basri Cantay. 1986. "Kebudayaan Islam di Daerah-Daerah Turki". Dalam K.W. Morgan (peny.) *Islam Jalan Lurus*. Pustaka Jaya: Jakarta. Halaman 290.
- Qardowi, *Op. Cit.*, halaman 281.
- <http://www.artikata.com>. Diakses tanggal 11 Juli 2011, pukul 19:00 WIB.
- Syafiie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Politik*. Rineka Cipta: Jakarta. Halaman 53.
- Syafiie. *Ibid* , halaman 54.
- W.M. Watt. 1990. *Kejayaan Islam, Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*. Tiara Wacana Yogya: Yogyakarta. Halaman 105.
- Muhammad Sholihin. 2010. *(Menyatu Diri dengan Illahi) Makrifat Ruhani Syaikh 'Abd Al-Qadir Al-Jailani dan Perspektifnya terhadap Paham Manunggaling Kawula Gusti*. Narasi: Yogyakarta. Halaman 55.
- Ahmad Zaeni pada <http://www.shoutmix.com>. Diakses tanggal 11 Juli 2011, pukul 19:00 WIB.
- Republika Online. *Geliat Ilmu Pengetahuan di Era Dinasti Seljuk*. Diakses tanggal 15 Juli 2011, pukul 11:00 WIB.